PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PENDIDIKAN
SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 2
SALATIGA
Jalan Tegalrejo Nomor 79, Argomulyo, Kota Salatig, Jawa Tengah, Kode Pos 50733,
Telepon 02980-322250, Faksimile 0298-316638, Laman https://sma2salatiga.sh.id
Pos-el : sman2_20328448@sma2salatiga.sch.id

MODUL AJAR

Nama Sekolah : SMA Negeri 2 Salatiga
Nama Guru : Masnun Suaedi, S.Pd
NIP Guru : 196806221998021002

Mata Pelajaran : Pendidikan Pancasila
Kelas & Semester : 10 - 1 (Gasal)
Tahun Pelajaran : 2026/2027

Topik: Kasus Pelanggaran Hak dan Pengingkaran Kewajiban

IDENTITAS	
Kesiapan Murid	Peserta didik dibagi menjadi tiga kelompok berdasarkan pemahaman awal: (1) Kelompok Tinggi: Telah memahami konsep dasar hak dan kewajiban serta mampu mengidentifikasi kasus secara kritis; (2) Kelompok Sedang: Memahami konsep dasar tetapi perlu bantuan dalam menganalisis faktor penyebab; (3) Kelompok Perlu Bimbingan: Masih kesulitan membedakan antara hak dan kewajiban warga negara.
Materi yang Dikuasai	1. Substansi Hak dan Kewajiban Warga Negara dalam Pancasila 2. Faktor Penyebab Pelanggaran Hak dan Pengingkaran Kewajiban 3. Kasus-Kasus Pelanggaran Hak Cipta, Kekerasan, dan Diskriminasi 4. Kasus-Kasus Pengingkaran Kewajiban Pajak, Pelanggaran Lalu Lintas, dan Korupsi 5. Upaya Penanganan dan Pencegahan oleh Pemerintah dan Masyarakat
Profil Lulusan	1. Bernalar Kritis: Mampu menganalisis kasus secara objektif dan mendalam 2. Gotong Royong: Bekerja sama dalam kelompok untuk merumuskan solusi atas masalah sosial dan hukum 3. Beriman, Bertakwa kepada Tuhan YME, dan Berakhlak Mulia: Mengembangkan integritas pribadi dan kepedulian terhadap keadilan
DESAIN PEMBELAJARAN	
Capaian Pembelajaran	Peserta didik mampu menganalisis kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara beserta dampaknya terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara; merumuskan solusi solutif berbasis nilai-nilai Pancasila; serta mempraktikkan perilaku taat hukum dan norma dalam kehidupan sehari-hari.
Lintas Disiplin Ilmu	1. Sosiologi: Menganalisis dampak sosial dan norma masyarakat 2. Hukum/Ketatanegaraan: Memahami peraturan perundang-undangan dan penegakan hukum 3. Ekonomi: Memahami implikasi pengingkaran kewajiban membayar pajak terhadap pembangunan negara
Tujuan Pembelajaran	1. Peserta didik mampu mengidentifikasi bentuk-bentuk pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara dengan tepat.

	2. Peserta didik mampu menganalisis faktor internal dan eksternal penyebab pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban secara kritis. 3. Peserta didik mampu merumuskan gagasan solutif dan inovatif untuk mencegah serta menanggulangi kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban.
Topik Pembelajaran	Analisis Komprehensif Kasus Pelanggaran Hak dan Pengingkaran Kewajiban Warga Negara dalam Perspektif Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Praktik Pedagogis	Problem-Based Learning (PBL) dipadukan dengan diskusi kelompok terintegrasi diferensiasi proses dan produk.
Kemitraan	1. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) - sebagai penyedia sumber studi kasus 2. Kepolisian / Kepolisian Sektor Lokal - sebagai narasumber edukasi lalu lintas dan hukum 3. Orang Tua - mendukung pembiasaan kedisiplinan dan pemenuhan kewajiban di rumah
Lingkungan Belajar	Ruang kelas yang inklusif, aman, demokratis, dan mendukung kebebasan berpendapat secara santun serta kolaboratif.
Pemanfaatan Digital	1. Padlet / Mentimeter untuk curah pendapat interaktif 2. Canva / Google Slides untuk pembuatan media presentasi kelompok 3. Google Forms / Quizizz untuk asesmen diagnostic dan formatif 4. Platform Berita Online terpercaya dan Video YouTube Dokumenter Kasus Hukum
LANGKAH PEMBELAJARAN (RINCI)	
Awal (Apersepsi)	1. Guru membuka pembelajaran dengan salam, doa, dan memeriksa kehadiran. 2. Es breaking singkat untuk mencairkan suasana. 3. Guru menyajikan kliping berita/video pendek mengenai kasus pelanggaran lalu lintas dan tunggakan pajak. 4. Apersepsi: Guru mengajukan pertanyaan pemantik: 'Mengapa masih banyak orang yang menuntut haknya namun enggan menjalankan kewajibannya?' 5. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan skenario kegiatan.
Inti (Memahami Konsep)	1. Orientasi Masalah: Peserta didik mengamati studi kasus kontekstual tentang pelanggaran hak (misal: kasus perundungan/bullying) dan pengingkaran kewajiban (misal: korupsi atau tidak membayar pajak). 2. Pengorganisasian Belajar: Peserta didik dibagi menjadi beberapa kelompok berdasarkan tingkat kesiapan belajar. 3. Peserta didik melakukan bedah materi mengenai akar masalah, dasar hukum yang dilanggar, serta dampaknya bagi masyarakat.
Inti (Aplikasi Praktis)	1. Penyelidikan Kelompok: Setiap kelompok memilih satu kasus nyata di Indonesia (kasus perundungan, pelanggaran hak cipta, penunggakan pajak, atau pelanggaran lalu lintas). 2. Kelompok menganalisis kasus menggunakan kerangka 5W+1H (Apa, Siapa, Di mana, Kapan, Mengapa, dan Bagaimana solusinya). 3. Kelompok menyusun gagasan pencegahan berbasis nilai Pancasila dalam bentuk infografis, poster digital, atau mini podcast.
Inti (Refleksi)	1. Setiap kelompok mempresentasikan hasil analisis dan solusinya di depan kelas. 2. Kelompok lain memberikan tanggapan, pertanyaan, atau masukan konstruktif. 3. Guru menyelaraskan pemahaman dan memberikan penguatan konsep terkait pentingnya keseimbangan antara hak dan kewajiban warga negara.

Penutup	1. Peserta didik bersama guru menyimpulkan poin-poin utama pembelajaran. 2. Peserta didik mengisi lembar refleksi diri secara digital (apa yang dipahami, apa yang belum dipahami, dan komitmen diri). 3. Guru memberikan apresiasi atas partisipasi siswa dan menyampaikan topik materi untuk pertemuan berikutnya. 4. Pembelajaran ditutup dengan doa bersama.
ASESMEN PEMBELAJARAN	
Asesmen Awal	Tes diagnostik kognitif singkat melalui Quizizz/Google Forms berupa 5 pertanyaan pilihan ganda kompleks untuk mengukur pemahaman awal konsep hak dan kewajiban.
Asesmen Proses	Penilaian formatif berupa observasi sikap (rubrik keaktifan, kerja sama), lembar kerja peserta didik (LKPD) kelompok, dan penilaian antarteman saat diskusi.
Asesmen Akhir	Penilaian sumatif berupa penilaian produk (infografis/poster/podcast analisis kasus) menggunakan rubrik analitik dan tes tertulis berupa soal uraian berbasis studi kasus (HOTS).

LAMPIRAN:

Jenis Lampiran	Keterangan (Detail)
Materi Pembelajaran	Materi mencakup ringkasan pasal-pasal UUD NRI 1945 tentang hak dan kewajiban (Pasal 27 - 34), definisi pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban, faktor penyebab (Sikap egois, rendahnya kesadaran hukum, penyalahgunaan kekuasaan, ketidaktegasan aparat penegak hukum), serta contoh-contoh kasus nyata di Indonesia beserta upaya penanganannya secara preventif dan represif.
Instrumen Asesmen	1. Rubrik Penilaian Sikap (Gaya Kritis dan Gotong Royong). 2. Rubrik Penilaian Presentasi dan Produk Infografis/Poster (Kriteria: Kedalaman analisis, relevansi solusi, estetika, kejelasan penyampaian). 3. Lembar Soal Evaluasi Tertulis HOTS beserta kunci jawaban dan pedoman penskoran.

EVALUASI PEMBELAJARAN:

Evaluasi dilakukan dengan merefleksikan persentase siswa yang mencapai Kriteria Ketercapaian Tujuan Pembelajaran (KKTP). Jika terdapat >20% siswa belum mencapai KKTP, dilakukan remedial teaching berbasis tutoring teman sebaya. Kegiatan pengayaan diberikan kepada siswa yang telah melampaui standar berupa analisis kasus pelanggaran tingkat internasional.

Rubrik Penilaian Kelompok:

1. Kemampuan bekerja sama dalam kelompok
2. Keaktifan dalam menyampaikan pendapat
3. Ketetapan argumen berbasis data/fakta

Skala: 1 s.d 4 (Kurang, Cukup, Baik, Sangat Baik)

Mengetahui,
Kepala Sekolah

Subroto, S.Pd., M.Pd
NIP 197111131995011001

Salatiga, 02 Nov 2026
Guru Mata Pelajaran

Masnun Suaedi, S.Pd
NIP 196806221998021002